

TUNGGU PEMERINTAHAN SELANJUTNYA DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Dikaji

JAKARTA (KR) - Pemerintah terus mengkaji kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025. Kebijakan tersebut telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah juga memantau perkembangan terkini.

“Kajian akan terus kami jalankan, dan transisi pemerintah juga akan terjadi, jadi kami juga menunggu,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3).

Pernyataan tersebut merespons pertanyaan Komisi XI DPR RI yang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai kenaikan PPN 12 persen akan berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, terlebih di kalangan kelas menengah yang pendapatannya di kisaran Rp 4 - 5 juta perbulan.

Menurutnya, berbeda dengan kelompok bawah atau masyarakat miskin yang menjadi target sasaran kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah, kelompok menengah tidak memiliki ketahanan yang cukup

* Bersambung hal 7 kol 5

ASN Tak Boleh Menolak Dipindahkan ke IKN

JAKARTA (KR) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Pu-tranto menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di instansi pusat setingkat kementerian atau badan tidak boleh menolak untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Walaupun begitu, Haryomo menolak bahwa hal tersebut disebut sebagai paksaan, melainkan merupakan sebuah kewajiban. Sebab, menurutnya, para ASN tersebut sudah membuat pernyataan dan perjanjian tentang kesiapan untuk ditugaskan di mana saja.

“Kita tidak mungkin memaksa seseorang pindah. Juga tidak boleh terus mereka memilih tidak mau pindah, nggak boleh,” kata Haryomo dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/3).

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis Kesejahteraan Digital

Thoriq Tri Prabowo MIP

MASIFNYA perkembangan teknologi di pelbagai lini memungkinkan banyak hal dilakukan secara efektif dan efisien. Singkatnya, teknologi telah mampu membantu banyak aspek mulai dari cara bersosial, pengembangan diri, belajar, dan bahkan bekerja. Kendati teknologi menjanjikan produktivitas, dampak dari penggunaannya juga tidak terelakkan.

Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu telah mengakselerasi penggunaan teknologi pada tahapan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dampaknya, terdapat normal baru dalam banyak aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh dalam bersosialisasi, masyarakat modern lebih banyak menggunakan media sosial ketimbang komunikasi tatap muka, fenomena tersebut memunculkan istilah emendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam aspek yang lebih personal, banyak dari masyarakat kiwari mengalami stres, distraksi, dan *digital overload*. Yakni kondisi dimana seseorang terlalu banyak terpapar informasi digital, sehingga merasakan tekanan dan ketegangan yang merugikan kesehatan mental.

Penggunaan teknologi sudah semestinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). *Programme for International Student Assessment* (PISA), sebuah program survei untuk siswa pada aspek literasi, matematika,

* Bersambung hal 7 kol 1



KR-Antara/Galih Pradipta

PENGAMANAN UNJUK RASA: Sejumlah anggota polisi bersiap melakukan penjagaan saat unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Polda Metro Jaya mengerahkan 3.355 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR dan KPU.

Hasil Rekapitulasi Nasional Menko Polhukam: Hari Ini Selesai

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) rampung tepat waktu yakni Rabu (20/3) hari ini.

Hal tersebut disampaikan Hadi Tjahjanto saat merespons perta-

nyaan pers soal keterlambatan KPU merampungkan hasil rekapitulasi nasional dari target yang sudah ditentukan yakni 18 Maret.

“Masih sesuai rencana. Sesuai

dengan UU, 35 hari setelah pemilu kita umumkan, berarti jatuh pada tanggal 20 Maret. Berarti sesuai dengan rencana,” ujar Hadi

* Bersambung hal 7 kol 1

MK Lantik Gugus Tugas Tangani Perselisihan Hasil Pemilu



KR-Antara/Muhammad Admaja

Anggota Gugus Tugas Perselisihan Pemilu 2024 mengikuti acara pelantikan Gugus Tugas Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Jakarta, Selasa (19/3/2024).

JAKARTA (KR) - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melantik anggota gugus tugas dalam rangka dukungan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024. Pelan-

tikan digelar di depan Gedung II MK, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Pelantikan dipimpin Ketua MK Suhartooyo dan diikuti pembacaan sumpah yang menyatakan komitmen anggota gugus tugas

untuk setia dan taat pada UUD 1945, menjaga integritas, bersikap disiplin, berdedikasi serta profesional.

“Saya, Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam penugasan yang baru di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam tugas sebagai gugus tugas penanganan perkara PHPU,” ucap Suhartooyo.

Dalam sambutannya, ia menuturkan, dirinya meyakini seluruh pegawai MK yang masuk dalam gugus tugas telah memiliki komitmen untuk menjaga kredibilitas, integritas dan menjaga marwah kelembagaan sesuai dengan isi sumpah yang telah dibacakan.

* Bersambung hal 7 kol 5

JAGA STOK DI PASAR DAN OUTLET Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang

JAKARTA (KR) - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras premium dari Rp 13.900/kg menjadi Rp 14.900/kg. Perpanjangan dilakukan sampai April 2024.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui relaksasi HET dengan kenaikan harga beras sebesar Rp 1.000/kgitu diperpanjang selama sebulan ke depan. “Bapanas menyampaikan pada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium sebelumnya (Rp) 13.900 ke (Rp) 14.900 kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang satu bulan supaya stok di market, terutama modern market dan outlet-outlet terjaga,” katanya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3).

Arief menjelaskan, relaksasi HET beras premium sebelumnya telah diberlakukan sementara mulai 10 Maret hingga 23 Maret 2024. Relaksasi HET beras premium diperpanjang bertujuan menjaga stok beras tersedia di pasaran, baik pasar ritel modern maupun pasar tradisional.

Diperpanjangnya kebijakan ini juga dilakukan untuk menunggu turunnya harga gabah kering panen (GKP) menjelang panen raya bulan Maret dan April. “Kan sampai 24 (Maret) ini, 24 kita perpanjang lagi, dari 24 sampai 24 (April) berikutnya lah, karena kan supaya beras itu tetap ada di pasar, sambil sesuaikan GKP untuk turun,” kata Arief.

* Bersambung hal 7 kol 5

Jadwal Imsakiyah	Zuhur	Asar	Maghrib	Isya	Imsak	Subuh
Rabu, 20 Maret 2024	11:49	15:01	17:52	19:01	04:18	04:28

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

PERBAIKAN JALAN GODEAN Bertahap, Diawali 1,5 Km

YOGYA (KR) - Perbaikan kerusakan ruas Jalan Godean dilakukan bertahap mengingat keterbatasan anggaran. Tahap awal ruas yang akan diperbaiki sepanjang 1,5 kilometer (dari Jembatan Berjo 2 sampai sekitar Pom Bensin Sidorejo) dengan dana APBD DIY murni Rp 11 miliar.

“Upaya perbaikan terus kami usahakan. Kalau ruas jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat dan ditindaklanjuti dengan penyampaian aspirasi berada di ruas jalan 6,5 kilometer. Sebetulnya pada tahun 2022 ada anggaran, namun hanya mampu 0,5 km saja. Sedangkan tahun 2023 sudah direncanakan, tapi baru muncul tahun ini dengan anggaran Rp 11 miliar untuk 1,5 kilometer,” kata Sekda DIY Beny Suharsono di kantornya, Selasa (19/3).

Beny mengatakan, sebetulnya Pemda DIY sudah mengajukan permohonan bantuan Pemerintah Pusat melalui dana Inpres Jalan Daerah (IJD). Tapi dikarenakan anggaran nasional atau pusat memiliki keterbatasan, IJD untuk ruas Jalan Godean jadi tertunda. Kendati demikian, Pemda DIY terus mengupayakan permohonan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

* Bersambung hal 7 kol 5

GENANGI 6.523 RUMAH, 2.295 HA SAWAH

7 Warga Kudus Meninggal Akibat Banjir



KR-Antara/Aji Styawan

Seorang pengurus makam menunjukkan situs Selo Palenggahanipun Kanjeng Sunan Kalijaga yang terendam banjir di Kawasan Cagar Budaya Situs Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Demak, Jawa Tengah, Selasa, (19/3/2024).

mukan di tanggul sungai tak jauh dari areal pene-muan sebelumnya. Kemu-

dian satu korban mening-gal dunia diduga akibat tersengat aliran listrik, di-

temukan petugas gabung-an tergeletak di genangan banjir. “Hari ini kembali

ditemukan satu korban la-gi di areal persawahan

* Bersambung hal 7 kol 5

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● **AWAL** puasa 11 Maret lalu, keponakan saya yang masih TK pada pukul 11.45 membawa sosis kemudian minta izin untuk makan. Bundanya mengatakan sebaiknya menunggu azan zuhur. Sesaat kemudian neneknya, melaporkan keponakan saya duduk di belakang kursi sambil komat-kamit azan sendiri, kemudian makan sosis. (Uswah Nurindrapuspita, Krapyak Kulon RT 05 Panggungharjo, Sewon Bantul)-d